

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah populasi penduduk yang besar sehingga Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan populasi penduduk yang sangat tinggi. Menurut data CIA World Factbook 2014, Indonesia menempati urutan ke-4 dengan jumlah populasi mencapai 253.609.643 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tidak lantas menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam negeri. Bahkan Indonesia memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan sosial yang ada membuat beberapa individu atau kelompok menjadi kesulitan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dari beberapa permasalahan sosial yang ada saat ini, gelandangan pengemis, anak jalanan, gelandangan psikotik, lansia terlantar dan wanita tuna susila menjadi masalah dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia.

Kehadiran gelandangan dan pengemis yang biasa disebut gepeng ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu. Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia hingga saat ini tidak mampu terselesaikan, bahkan saat ini bisa dikatakan menjadi semakin memburuk dengan melemahnya mata uang dalam negeri di mata dunia. Buruknya perekonomian Indonesia yang ditambah dengan buruknya pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang efektif membuat kesenjangan di masyarakat menjadi semakin besar. Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi menimbulkan persaingan dalam hal mencari penghidupan semakin sulit, masyarakat yang tidak mempunyai bekal yang cukup dan keterampilan yang memadai akan tereliminasi, sehingga mencari penghasilan dengan cara instan menjadi pilihan yang banyak digunakan masyarakat untuk mencari penghasilan yaitu dengan cara mengemis dan meminta-minta. Jumlah gelandangan mencapai 18.599 orang

dan pengemis mencapai 178.262 orang (Pusat Data dan Informasi Kemensos, 2012). Jumlah ini diperkirakan dapat terus bertambah mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kunjung membaik.

Selain gelandangan dan pengemis, permasalahan sosial yang lain adalah bertambahnya jumlah anak jalanan, lansia terlantar, gelandangan psikotik, lanjut usia terlantar dan wanita tuna susila yang dikategorikan sebagai permasalahan sosial yang diprioritaskan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Prioritas (PMKS) merupakan individu atau sekelompok masyarakat yang dikarenakan ketidakmampuan atau keterbatasan tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya sehingga kesulitan untuk menyesuaikan diri didalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alasan kenapa PMKS Prioritas ini menjadi perhatian utama adalah, kebanyakan dari PMKS prioritas ini semakin banyak dan sulit diatur sehingga terkadang mereka sering dijumpai di pertigaan, perempatan lampu merah, tempat umum, dan kawasan permukiman. Berkeliarannya PMKS di sudut-sudut kota ini semakin meresahkan warga dan terkadang mengganggu keindahan dan keamanan kota.

Jumlah PMKS prioritas yang cukup besar ini hampir terjadi diseluruh perkotaan yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Malang. Menurut data Malang Dalam Angka tahun 2012 jumlah PMKS Prioritas di Kota Malang mencapai 593 orang. Jumlah ini merupakan jumlah yang terhitung, namun tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah mengingat jumlah PMKS prioritas tidak dapat diprediksi karena setiap tahun ada faktor-faktor yang membuat jumlah PMKS prioritas mengalami kenaikan. Salah satunya adalah jumlah pengemis yang meningkat saat bulan puasa, jumlah anak jalanan yang sering bermigrasi dari kota satu ke kota lain dan jumlah Wanita Tuna Susila yang sulit terdeteksi keberadaannya.

Mengutip dari BASIS DATA Pemerintah Kota Malang tahun 2004, mencatat dari 5 kecamatan terdapat 548 anak jalanan dan yang telah berhasil di latih hanya 15 orang. Ini berarti hanya 3 persen dari total keseluruhan anjal yang mampu di selesaikan oleh pemerintah dan ditempatkan sementara di panti asuhan yang terdapat di 5 kecamatan.. Pada tahun 2014 sebanyak 360 orang diberikan pembinaan serta bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian oleh bagian rehabilitasi dinas sosial. Meskipun begitu masih terdapat kekurangan dari dinas sosial dalam manangani anjal. Hal ini

dikarenakan dalam hal menangani para anjal seharusnya dilakukan pemisahan dan ditanganin secara khusus karena anjal yang tergolong sebagai anak-anak dan remaja.

Gelandangan Psikotik merupakan seseorang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan yang seringkali hidup berpindah-pindah. Mereka seringkali hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan serta menjadi permasalahan di kota Malang. Menurut data Dinas Sosial Provisinsi Jawa Timur terdapat 1288 gelandangan psikotik pada tahun 2006. Masalah lain adalah semakin menjamurnya wanita tuna susila di kota Malang. Berdasarkan hasil pantau dari *Tribunnews.com* razia yang dilakukan oleh pemkab Malang berhasil menjaring sebanyak 324 orang tuna susila. Mereka berhasil dijaring pada tujuh lokalisasi pada kecamatan yang berbeda antara lain kecamatan Ngantang, Pujun, Kromengan, Wonosari, Sumber Pucung, Gondanglegi dan Sumbermanjing Wetan. Para pekerja tuna susila yang telah terjaring razia ini rata-rata ditangkap lalu dipulangkan atau dibebaskan. Namun pada kenyataannya razia yang dilakukan tidak memberikan efek jera terhadap para pekerja tuna susila tersebut. Hal ini dikarenakan mereka kembali melakukan pekerjaan prstitusi untuk memperoleh pekerjaan yang cepat dan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan besar yang dihadapi oleh fenomena ini adalah meningkatnya jumlah penderita infeksi menular (IMS) di kota Malang. Hingga tahun 201 penderita IMS tercatat sebanyak 2204 penderita dan 800 dari total keseluruhan merupakan pengidap penyakit HIV/AIDS.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang terjadi diatas, PMKS perlu segera mendapatkan penanganan agar tidak terjadi dampak yang lebih besar terutama dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Penanganan permasalahan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan pembangunan sebuah tempat penampungan sementara bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan, gelandangan psikotik, lansia terlantar, dan wanita tuna susila. Penampungan sementara tersebut disebut juga dengan Lingkungan Pondok Sosial (Liposos).

1.1.2 Fasilitas Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Suatu hambatan dan kesulitan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok masyarakat sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dan menurunnya kemampuan dalam melakukan kegiatan sosial merupakan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Salah satu penangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan membuat

penampungan sementara berupa Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos). Salah satunya adalah Liponsos Keputih yang terdapat di kota Surabaya yang dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 1997. Tujuan didirikannya Liponsos Keputih adalah untuk penampungan sementara yang diperuntukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang bersifat sebagai Panti Rehabilitasi Sosial.

Akan tetapi berdirinya Liponsos Keputih Surabaya tidak lantas dapat menyelesaikan permasalahan PMKS secara tuntas. Karena nyatanya saat ini Lingkungan Pondok Sosial Keputih masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi guna memaksimalkan pelayanan dan rehabilitasi bagi para PMKS. Dalam artikel yang berjudul *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liponsos Keputih Kota Surabaya* oleh Muttaqin (2014), memparkan bahwa Liponsos Keputih Kota Surabaya belum layak dijadikan sebagai penampungan atau tempat tinggal sementara bagi PMKS. Karena PMKS yang ditampung didalam Liponsos harus menempati ruangan yang sempit, kotor, lembab dan mereka harus tinggal didalam barak yang kondisinya kotor, drainasepembuangan yang kurang layak dan terkadang berbau tidak sedap. Sehingga terkadang mereka harus rela tidur bersama dengan kotoran-kotoran mereka sendiri. Dalam jurnal tersebut juga memaparkan interaksi dengan salah seorang gepeng yang terjaring dan tertangkap oleh Dinas Sosial. Dalam keterangannya menyebutkan tidak nyamannya ruangan di liponsos dan kegiatan yang dibatasi karena terbatasnya ruang serta pembagian jatah makanan yang tidak merata.

Selain Pemkot Surabaya, Pemerintah Kota Sidoarjo dalam penanggulangan PMKS juga telah menyiapkan Liponsos pada tahun 2012. Bangunan yang dijadikan Liponsos adalah bekas gedung SMKN 2 Sidoarjo, jika dilihat permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian bangunan Liponsos yang awalnya di desain sebagai Sekolah Menengah Kejuruan yang dialih fungsikan menjadi tempat penampungan bagi PMKS.

Hal ini membuktikan bahwa dalam perancangan Liponsos memang memerlukan pendekatan yang berbasis pada perilaku PMKS yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial yang berbeda – beda. Sebagai contoh pendekatan yang diterapkan pada gelandangan psikotik dengan anak jalanan haruslah berbeda.

1.1.3 Kebutuhan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) di Kota Malang

Jumlah PMKS dari data yang dikeluarkan oleh Dinsos Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai 39.313 orang. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Malang perlu

merencanakan pembangunan Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial). Hal ini bertujuan agar para PMK dapat segera mendapat penanggulangan, sehingga dapat mengurangi jumlah pelaku permasalahan sosial di Kota Malang. Liponsos dapat memberikan fasilitas berupa penampungan sementara yang dikelola oleh Dinas Sosial, dimana Liponsos tersebut akan dilengkapi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Pada tahun 2014 Bappeda Kota Malang telah menyusun Studi Kelayakan dan pra DED untuk pembangunan Liponsos dan BLK di area kelurahan Arjowinangun, Kedungkandang.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang dapat disimpulkan beberapa inti permasalahan, yaitu:

1. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Indonesia dari tahun ke tahun tidak terjadi penurunan yang signifikan bahkan cenderung mengalami kenaikan.
2. Terjadinya kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis setiap tahun di kota Malang.
3. Penanganan yang dilakukan kepada anak jalanan di kota Malang belum berjalan secara efektif. Dari data yang di dapat hanya 3 persen dari mantan anak jalanan yang ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah.
4. Jumlah gelandangan psikotik kota malang berjumlah 1288 orang dan belum mendapatkan perhatian khusus.
5. Wanita Tuna Susila (PSK) di kota Malang meningkat. Banyak berdiri lokalisasi-lokalisasi dadakan dan ditakutkan meningkatnya penderita IMS bagi masyarakat.
6. Penampungan sementara bagi PMKS yaitu Liponsos yang ada selama ini belum sesuai karena belum memiliki kriteria desain yang khusus dibuat untuk para PMKS. Selama ini liponsos hanya bangunan lama yang dialih fungsikan sebagai tempat penampungan sementara.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang akan diselesaikan pada perancangan Lingkungan Pondok Sosial adalah :

Bagaimana merancang Lingkungan Pondok Sosial yang berbasis pada pendekatan perilaku PMKS sehingga mendapatkan kriteria desain yang cocok untuk diterapkan pada Liponsos di kota Malang.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah dalam merancang Lingkungan Pondok Sosial yang berbasis pada pendekatan perilaku PMKS untuk mendapatkan kriteria desain yang cocok untuk diterapkan di kota Malang, yaitu :

1. PMKS memiliki permasalahan yang berbeda-beda tiap kasusnya, antaralain pengemis, gelandangan, anak jalanan, gelandangan psikotik, lansia ternatar dan wanita tuna susila. Diperlukan pendekatan perilaku untuk mendapatkan kriteria desain yang sesuai.
2. Tapak berdapa pada Area Kelurahan Arjowinangun Kota Malang.

1.5. Tujuan Perancangan

Pencapaian yang diharapkan berdasarkan tujuan dalam perancangan Lingkungan Pondok Sosial di Kota Malang ini adalah :

Merencanakan dan merancang Lingkungan Pondok Sosial yang berbasis pada pendekatan perilaku, dan memberikan solusi dalam bentuk desain arsitektur yang sesuai di kota Malang.

1.6. Manfaat Perancangan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan kontribusi kepada banyak pihak, seperti :

1. Instansi pendidikan dalam bidang arsitektur, agar dapat menambah wawasan terutama dalam perancangan Liponsos.
2. Peneliti lain dengan tema sejenis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi dan masukan dengan harapan kekurangan yang ada di penulisan ini dapat dikembangkan.
3. Pribadi, memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan terhadap proses perancangan sebuah bangunan Liponsos.
4. Pihak-pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari penulisan ini.

1.7. Kerangka Pemikiran



